

**MENGANALISIS PEMANFAATAN METODE *FAST TRACK LEGISLATION*
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU 12 Tahun 2011, dan yang terakhir Undang-Undang 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke 2. Selama terjadinya proses hingga diterbitkannya perubahan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak ada yang secara khusus mengatur terkait metode *Fast Track Legislation* namun secara pelaksanaannya sendiri di Indonesia ada beberapa undang-undang yang menggunakan jalur legislasi yang cepat dalam kurun 5 tahun terakhir seperti hal nya Undang-Undang KPK, Undang-Undang MK, Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun sebenarnya ada juga mekanisme dalam membuat undang-undang yang cepat di Indonesia yaitu pembentukan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dimana tujuannya untuk merespon suatu kegentingan yang memaksa tapi kita juga dapat menganalisis peluang pemanfaatan metode *Fast Track Legislation* dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kriteria seperti apa yang diterapkan secara khusus apabila metode *Fast Track Legislation* diterapkan di Indonesia

Kata Kunci : *Fast Track Legislation*, Undang-Undang, Pembentukan Peraturan

***ANALYZING THE USE OF THE FAST TRACK LEGISLATION METHOD IN
THE FORMATION OF LEGISLATION AND REGULATIONS IN INDONESIA***

ABSTRACT

The establishment of laws and regulations in Indonesia has been regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations in Indonesia, Law 15 of 2019 concerning Amendments to Law 12 of 2011, and finally Law 13 of 2022 concerning the 2nd Amendment. During the process until the issuance of changes to the Law on the Establishment of Laws and Regulations in Indonesia, no one specifically regulates the Fast Track Legislation method, but in its own implementation in Indonesia there are several laws that use fast legislation channels in the last 5 years such as the KPK Law, the Constitutional Court Law, the Job Creation Law. Although there is actually also a mechanism in making laws quickly in Indonesia, namely the establishment of government regulations in lieu of laws (Perppu) where the goal is to respond to a compelling emergency but we can also analyze the opportunities for the use of the Fast Track Legislation method in the Law on the Establishment of Laws and Regulations and what criteria are applied specifically if the Fast Track Legislation method is applied in Indonesia

Keywords: Fast Track Legislation, Act, Establishment of Regulations